
**PENGARUH STRUKTUR ASET, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN
UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *DEBT POLICY* PADA PERUSAHAAN
SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI
DI BURSA EFEK INDONESIA**

Deti

email: deticuitcuit96@gmail.com

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Widya Dharma Pontianak

ABSTRAK

Debt policy merupakan keputusan penting dalam menjamin kelangsungan aktivitas operasional perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur aset, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap *debt policy* perusahaan. Objek dalam penelitian ini adalah 35 Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia. Analisis dengan *common effect regression model*. Hasil penelitian ini menunjukkan struktur aset dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *debt policy*, kepemilikan institusional berpengaruh negatif. Model penelitian ini dapat menjelaskan perubahan kebijakan *debt policy* sebesar 15,4 persen.

Kata kunci: Struktur aset, kepemilikan institusional, ukuran, *debt policy*.

PENDAHULUAN

Manajer diberi kepercayaan oleh para pemegang saham untuk mengelola, menjalankan, dan mengatasi berbagai hambatan agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Dalam mengelola perusahaan manajer membutuhkan dana untuk mendanai kegiatan operasionalnya. Salah satu sumber pendanaan perusahaan adalah dengan utang. Kebijakan utang merupakan cara bagaimana perusahaan memanfaatkan fasilitas pendanaan dari luar (utang) untuk mendekat kegiatan operasional perusahaan, dan juga agar jumlah penggunaannya dapat meminimalisir besarnya risiko yang harus ditanggung perusahaan seperti keunggulan dari utang tersebut.

Kebutuhan pendanaan perusahaan disesuaikan dengan struktur aset (Yuniarti, 2013; Hardiningsih dan Oktaviani, 2012) dan skala usaha perusahaan (Narita, 2012; Hasan dan Nurmayanti, 2013). Struktur aset yang besar selain menunjukkan kebutuhan pendanaan, juga dapat dijadikan jaminan oleh perusahaan. Kreditur akan mudah memberi pinjaman bila disertai jaminan yang besar. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan dengan memperoleh melalui utang.

Penentuan sumber pendanaan oleh manajemen dapat pula tergantung pada pengawasan oleh pemilik. Adanya kepemilikan institusional dalam hal ini akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal pada manajer sehingga manajemen akan berhati-hati dalam perolehan pendanaan dari utang. Selain itu, semakin tinggi kepemilikan institusional maka ketergantungan sumber pendanaan dari utang untuk mendanai perusahaan juga akan semakin kecil. Hal ini disebabkan pendanaan dari utang dapat meningkatkan pengawasan oleh kreditur yang menyebabkan kurang fleksibelnya proyek yang dijalankan perusahaan (Tjeleni, 2013; dan Murtiningtyas, 2012).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh struktur aset, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap *debt policy*. Objek yang dipilih dalam penelitian ini yaitu perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia dengan pertimbangan sektor tersebut merupakan industri yang melakukan kegiatan produksi barang kebutuhan sehari-hari masyarakat yang dalam kegiatan operasional.

KAJIAN TEORITIS

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan membutuhkan sumber dana yang dapat diperoleh baik dari internal maupun eksternal. Salah satu sumber dana yang digunakan perusahaan dapat berasal dari utang (sumber eksternal). Menurut Rudianto (2009: 292): “Utang adalah semua kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang/jasa/barang di masa mendatang kepada pihak lain, akibat transaksi yang dilakukan di masa lalu.” Kebijakan utang (*debt policy*) mencerminkan kebijakan pendanaan perusahaan. Kebijakan ini penting dilakukan oleh manajemen untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan.

Menurut Prathiwi dan Yadnya (2017): “Kebijakan utang merupakan cara bagaimana perusahaan memanfaatkan fasilitas pendanaan dari luar (utang) agar jumlah penggunaannya dapat meminimalisir besarnya risiko yang harus ditanggung perusahaan seperti keunggulan dari utang tersebut.” Selanjutnya menurut Tjeleni (2013): “Kebijakan utang merupakan keputusan pendanaan yang penting bagi kelangsungan aktivitas di sebuah perusahaan. Dimana kebijakan utang merupakan bagian dari kebijakan pendanaan perusahaan. Kebijakan utang adalah kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen

dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan bagi perusahaan sehingga dapat digunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan.”

Dimana kebijakan utang merupakan bagian dari kebijakan pendanaan perusahaan. Kebijakan utang adalah kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan bagi perusahaan sehingga dapat digunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. ”*Debt policy* dapat diukur dengan menggunakan *debt to equity ratio* (DER) yang merupakan perbandingan antara total utang dan total ekuitas. Rasio ini mencerminkan kemampuan perusahaan menjamin pemenuhan kewajiban yang telah dimiliki dengan menggunakan ekuitas yang ada pada perusahaan. Hal ini sebagaimana menurut Harahap (2011: 303): DER merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana ekuitas pemilik dapat menutupi utang-utang kepada pihak luar, sehingga untuk keamanan pihak luar rasio ini baik jika jumlah ekuitas lebih besar dari jumlah utang atau minimal sama

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa semakin tinggi DER menunjukkan, semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Kondisi ini berakibat pada semakin tingginya risiko dan beban keuangan pada perusahaan.

Kebutuhan pendanaan dapat diketahui dari struktur aset, yang merupakan gambaran kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dapat diketahui dari aset tetap. Struktur aset merupakan perbandingan antara aset tetap dan total aset yang dapat menentukan besarnya alokasi dana untuk masing-masing komponen aset. Menurut Kasmir (2018: 39): “Aset tetap merupakan harta atau kekayaan perusahaan yang digunakan dalam jangka panjang lebih dari satu tahun. Secara garis besar aset dibagi dua macam, yaitu aset tetap berwujud dan aset tidak berwujud.” Aset tetap merupakan salah satu aset penting bagi perusahaan yang dapat dijadikan sebagai jaminan untuk meyakinkan pihak eksternal agar dapat memberikan pinjaman kepada perusahaan. Hal ini sebagaimana menurut Hardiningsih dan Oktaviani (2012): “Aset yang dimiliki oleh perusahaan akan mempunyai pengaruh perusahaan terhadap hubungannya dengan pihak lain. Aset merupakan salah satu jaminan yang bisa meyakinkan pihak lain untuk bisa memberikan pinjaman kepada perusahaan, sehingga perusahaan yang struktur asetnya lebih fleksibel akan lebih mudah memperoleh pinjaman.

Menurut Rudianto (2009: 5): Kreditur yang memberikan pinjaman dana kepada perusahaan untuk berbagai keperluan usaha. Sebagai pihak yang memberikan pinjaman dana kepada perusahaan, kreditur membutuhkan informasi untuk jaminan bahwa uang yang dipinjamkannya akan dibayar beserta bunganya dan informasi yang diperlukan yaitu besarnya kekayaan perusahaan, kemampuan menghasilkan laba usaha dan perbandingan utang dengan total kekayaan perusahaan.

Perusahaan yang memiliki aset tetap yang besar akan membuat keputusan untuk lebih banyak menggunakan utang dalam pendanaan perusahaannya karena kepemilikan aset tetap yang besar memberikan kemudahan dalam memperoleh pinjaman dari kreditur. Oleh karena itu, struktur aset dapat memengaruhi kebijakan utang (*debt policy*) perusahaan. Hasil penelitian Hardiningsih dan Oktaviani (2012) dan Yuniarti (2013) juga menunjukkan bahwa Semakin tinggi struktur aset perusahaan, maka semakin tinggi utang yang digunakan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, dibangun hipotesis pertama dalam penelitian ini:

H₁: Struktur aset berpengaruh positif terhadap *debt policy* perusahaan.

Kepemilikan institusional mencerminkan kepemilikan saham perusahaan oleh institusional keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *asset management*. Di dalam perusahaan, kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam mengawasi manajer. Pihak institusional diharapkan mampu melakukan pengawasan lebih baik terhadap kebijakan manajer dikarenakan dari segala skala ekonomi dan informasi, pihak institusional cenderung lebih mudah untuk memperoleh informasi dan menganalisis segala hal yang berkaitan dengan kebijakan manajer.

Menurut Murtiningtyas (2012): “Kebijakan utang yang dilakukan manajer untuk menambah dana perusahaan. Perlu adanya *monitoring* oleh pihak institusional agar keputusan yang dilakukan oleh manajer dapat dikontrol.” Kepemilikan institusional dapat memiliki peranan penting untuk mengawasi manajer terhadap kebijakan utang yang akan diambil.

Keberadaan kepemilikan institusional dapat mengawasi perilaku manajer perusahaan secara efektif sehingga pihak manajemen akan berkerja untuk kepentingan para pemegang saham. Adanya pengawasan yang efektif oleh kepemilikan institusional akan menyebabkan kehati-hatian dalam penggunaan utang. Hal ini berarti, semakin besar kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan, maka kebijakan perusahaan untuk

menggunakan utang akan semakin kecil. Menurut Narita (2012): “Adanya kepemilikan institusional oleh pihak eksternal akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal dari pihak luar terhadap manajer. Berdasarkan uraian tersebut, dibangun hipotesis kedua dalam penelitian ini:

H₂: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *debt policy* perusahaan.

Ukuran perusahaan ini mencerminkan besar kecilnya usaha dari suatu perusahaan. Menurut Narita (2012:): “Ukuran perusahaan secara langsung mencerminkan tinggi rendahnya aktivitas operasional suatu perusahaan. Pada umumnya semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin besar aktivitasnya. Dengan demikian ukuran perusahaan juga dapat dikaitkan dengan besarnya kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan.” Menurut Hasan dan Nurmawati (2013): “Ukuran perusahaan dapat mengukur atau menunjukkan suatu kondisi dari suatu perusahaan dengan berdasarkan total aset.”

Ukuran perusahaan merupakan karakteristik perusahaan yang dapat mengklasifikasikan apakah suatu perusahaan termasuk ke dalam ukuran perusahaan kecil, menengah, ataupun besar. Perusahaan kecil sangat rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi dan cenderung kurang menguntungkan sedangkan perusahaan besar memiliki kontrol yang lebih baik terhadap kondisi pasar sehingga mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi dan perusahaan besar juga tentu dapat lebih mudah mengakses pasar modal, karena kemudahan tersebut maka berarti bahwa perusahaan memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk mendapatkan dana. Semakin besar ukuran perusahaan semakin besar peluang mendapatkan dana dari pihak eksternal. Kemudahan ini yang akan dimanfaatkan oleh pihak manajemen untuk mendapatkan dana untuk operasional perusahaan ataupun investasi baru.

Menurut Nuringsih (2005): “Perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan besar akan lebih mudah memasuki pasar modal sehingga dengan kesempatan ini perusahaan membayar deviden besar kepada pemegang saham.” Hal ini bertujuan untuk menjaga reputasi dimata investor aktual maupun potensial dan untuk memudahkan perusahaan memasuki pasar modal apabila berencana melakukan emisi saham baru.

Perusahaan yang besar akan lebih mudah mendapatkan pinjaman dibandingkan dengan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan yang besar cenderung memiliki total aset yang besar pula sehingga dapat mempermudah perolehan dana karena cenderung lebih dapat meyakinkan kreditur terkait kelanjutan usaha perusahaan. Semakin besar ukuran

perusahaan juga menandakan bahwa perusahaan cenderung memiliki kemampuan untuk mengontrol maupun meningkatkan kinerjanya.

Besar dan kecil ukuran perusahaan terkait dengan kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman, sehingga para kreditur menilai perusahaan yang besar akan lebih mudah melakukan pengembalian atas utang tersebut. Perusahaan besar lebih banyak memiliki usaha yang terdiversifikasi, sehingga mudah dilirik investor maupun kreditur. Perusahaan yang besar juga akan dianggap mempunyai risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang kecil. Alasannya adalah karena perusahaan yang besar dianggap lebih mempunyai akses ke pasar modal, dimana hal tersebut akan mengurangi ketergantungan perusahaan pada pendanaan internal, sehingga perusahaan akan memberikan rasio pembayaran deviden yang tinggi. Perusahaan besar juga akan lebih mudah dikenal oleh publik dibandingkan perusahaan kecil. Sehingga perusahaan besar memiliki kemudahan dan kemampuan untuk mendapatkan dana.

Perusahaan yang memiliki total aset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan. Dalam tahap ini, perusahaan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama. Selain itu, perusahaan yang besar juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total aset yang kecil. Oleh karena itu ukuran perusahaan dapat memengaruhi kebijakan utang perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, dibangun hipotesis ketiga dalam penelitian ini:

H₃: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *debt policy* perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode asosiatif sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumenter. Data Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 sampai 2018. Populasi penelitian sebanyak lima puluh perusahaan dan sampel 35 perusahaan dengan penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*. Kriteria pengambilan sampel yaitu perusahaan yang telah IPO sebelum tahun 2014 dan perusahaan yang tidak di-*suspend*. Tahap analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis koefisien regresi korelasi dan uji hipotesis.

PEMBAHASAN

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014 hingga 2018 sebagai berikut:

TABEL 1
PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI DI BEI
STATISTIK DESKRIPTIF

| Descriptive Statistics | | | | | |
|---------------------------|-----|---------|---------|-----------|----------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| struktur aset | 175 | ,0030 | 0,9024 | ,433695 | ,1729914 |
| kepemilikan institusional | 175 | ,0445 | 0,9896 | ,658617 | ,3949393 |
| ukuran perusahaan | 175 | 10,9856 | 13,9847 | 12,397628 | ,6934634 |
| debt policy | 175 | ,0743 | 9,4474 | ,953872 | 1,0260123 |
| Valid N (listwise) | 175 | | | | |

Sumber: Hasil Output SPSS 22, 2021

Berdasarkan Tabel 1 nilai minimum *debt policy* sebesar 0,0743 menunjukkan bahwa Perusahaan Sektor Industri Barang di BEI terdapat perusahaan yang tidak terpengaruh terhadap *debt policy* dalam aktivitas operasionalnya yang dihasilkan sebesar 7,43 persen. Nilai minimum struktur aset sebesar 0,0030 menunjukkan bahwa tingkat aset perusahaan yang rendah. Kepemilikan institusional dengan nilai rata-rata sebesar 0,6586 menunjukkan bahwa institusi yang ada diperusahaan cukup tinggi.

2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian yang dilakukan menggunakan uji normalitas residual, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Hasil pengujian dipastikan telah memenuhi asumsi klasik.

3. Analisis Pengaruh struktur aset, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap *debt policy*.

Berikut adalah rekap hasil pengujian pada penelitian ini:

TABEL 2
HASIL PENGUJIAN

| Model | B | Standar Error | T | R | Adjust R Square | F |
|---------------------------|--------|---------------|--------|------|-----------------|----------|
| Constant | 0,095 | 2,569 | ,037 | ,411 | ,154 | 11,124** |
| Struktur aset | 0,571 | ,100 | 5,725* | | | |
| Kepemilikan institusional | -0,053 | ,065 | -,821 | | | |
| Ukuran perusahaan | -0,019 | 1,019 | -,019 | | | |

* signifikan pada 0,01

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan Tabel 2, berikut model persamaan regresi linier berganda:

$$Y = 0,095 + 0,571X_1 - 0,053X_2 + -0,019X_3$$

a. Korelasi dan Koefisien Determinasi

Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,411 berarti bahwa korelasi antara struktur aset, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan memiliki *debt policy* cukup kuat. Sedangkan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,154 menunjukkan bahwa perubahan *debt policy* dapat dijelaskan oleh struktur aset, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan sebesar 15,4 persen.

b. Uji F

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa nilai F sebesar 11,124. Hasil menunjukkan model penelitian yang melibatkan struktur aset, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap *debt policy* layak dilakukan.

c. Analisis Pengaruh

1) Pengaruh Struktur Aset terhadap *Debt Policy* Perusahaan

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai t sebesar 5,725 artinya struktur aset memiliki pengaruh positif terhadap *debt policy* pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi di BEI (hipotesis pertama diterima). Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prathiwi dan Yadnya (2017) serta Yeniati dan Destriana (2010). Perusahaan yang memiliki struktur aset yang besar akan cenderung lebih banyak menggunakan utang dalam pendanaan perusahaannya karena kepemilikan aset tetap yang besar memberikan kemudahan dalam memperoleh pinjaman. Sebagai pihak yang memberikan pinjaman dana kepada perusahaan, kreditur akan memperhatikan jaminan perusahaan. Aset tetap dalam hal ini merupakan salah satu informasi yang diperhatikan pihak kreditur karena aset tetap adalah harta perusahaan yang digunakan dalam jangka panjang dan merupakan bagian penting dalam perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti (2013) serta Hardiningsih dan Oktaviani (2012).

2) Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Debt Policy* Perusahaan

Tabel 2 menunjukkan nilai t pada kepemilikan institusional sebesar -0,821. Menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *debt policy* pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi (hipotesis kedua ditolak). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang

dilakukan Tjeleni (2013) dan Murtiniingtyas (2012). Tidak terdapatnya pengaruh kepemilikan institusional pada *debt policy* menjadi indikator bahwa kepemilikan ini tidak terlalu berpengaruh karena dalam pengambilan keputusan sumber dana perusahaan yang berasal dari internal yaitu laba ditahan dan sumber dana yang berasal dari eksternal yaitu pihak kreditur. Keberadaan kepemilikan institusional di dalam suatu perusahaan sebagai pihak yang memonitor manajemen dan tidak berperan aktif dalam pengambilan keputusan mengenai penggunaan utang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yeniatie (2010) serta Indahningrum dan Handayani (2009).

3) Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Debt Policy* Perusahaan

Nilai t ukuran perusahaan sebesar $-0,019$ menunjukkan bahwa berpengaruh negatif terhadap *debt policy* pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi (hipotesis ketiga ditolak). Penelitian ini bertantangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasan dan Nurmayanti (2013) dan Syadeli (2013). Kondisi ini disebabkan karena perusahaan besar dengan permodalan yang lebih kuat akan lebih menyukai pendanaan internal dan berhati-hati dalam menggunakan utang (*pecking order theory*). Ukuran perusahaan bukan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi *debt policy* karena ukuran perusahaan tidak dapat menjamin seberapa banyak utang tersebut digunakan dan seberapa banyak utang tersebut bisa dikembalikan. Dari sisi kreditur aset perusahaan bukan merupakan faktor utama yang dijadikan pertimbangan dalam memberikan utangnya. Kreditur dapat pula mempertimbangkan faktor lain atau lebih memperhatikan kredibilitas manajer perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Narita (2012) dan Nuringsih (2005) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *debt policy*.

PENUTUP

Dari hasil pengujian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *debt policy*, sedangkan struktur aset berpengaruh positif. Oleh sebab itu peneliti selanjutnya dapat berfokus menggunakan rasio lain dan variabel lain yang berpengaruh terhadap *debt policy*. Peneliti

lain dapat mempertimbangkan profitabilitas dan likuiditas dengan dengan berlandaskan pada *pecking order theory*.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Sofyan Syafri. 2011. *Analisis Kritis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Hardiningsih, Pancawati, dan Rachmawati Meita Oktaviani. 2012. "Determinan Kebijakan Hutang (Dalam Agency Theory dan Pecking Order Theory)." *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, vol. 1, No. 1, Mei, hal. 11-24.
- Hasan, Mudrika Alamsyah, dan Poppy Nurmawati. 2013. "Effect of Managerial Ownership, Free Cash Flow and Size Company Policy on Debt." *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, vol. 3, No. 9, Juli, hal. 218-233.
- Indahningrum, Putri Rizka, dan Ratih Handayani. 2009. "Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Deviden, Pertumbuhan Perusahaan, *Free Cash Flow*, dan Profitabilitas terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan." *Jurnal bisnis dan akuntansi*, vol. 11, No.3, Desember, hal. 189-207
- Kasmir. 2018. *Analisis Laporan Keuangan*. Depok: Rajawali.
- Murtiningtyas, Ivona Andhika. 2012. "Kebijakan Deviden, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Resiko Bisnis terhadap Kebijakan Hutang." *Accounting Analysis Journal*, vol. 1, No 2, November, hal. 1-6.
- Narita, Mersi Rona. 2012. "Analisis Kebijakan Hutang." *Jurnal Akuntansi*, vol. 1, No. 2, hal. 1-6.
- Nuringsih, Kartika. 2005. "Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Utang, ROA dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, vol. 2, No. 2, Juli-Desember, hal. 103-123.
- Prathiwi, Ni Made Dhyana Intan dan Putu Yadnya. 2017. "Pengaruh Free Cash Flow, Struktur Aset, Risiko Bisnis dan Profitabilitas terhadap Kebijakan Hutang." *E-Jurnal Manajemen Unud*, vol. 6, No. 1, hal. 60-86.
- Rudianto. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Syadeli, Moh. 2013. "Struktur kepemilikan, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan." *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, vol. 2, No. 2, Agustus, hal. 79-94.
- Tjeleni, E Indra. 2013. "Kepemilikan Manajerial dan Institusional Pengaruhnya terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 1, No. 3, September, hal. 1-11.

Yeniatie, dan Nicken Destriana. 2010. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang pada Perusahaan Nonkeuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.” *Jurnal bisnis dan akuntansi*, vol.12, No. 1, April, hal. 1-16.

Yuniarti, Dewi Muslida Ahadiyah. 2013. “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Dividen, Profitabilitas dan Struktur Aset terhadap Kebijakan Hutang.” *Accounting Analysis Journal*, vol. 2, No.4, hal. 447-454.

